

I. PENDAHULUAN

Analisis pemetaan potensi ekonomi wilayah memperlihatkan terjadinya disparitas pemanfaatan sumberdaya perikanan antara wilayah pesisir Utara, daratan dan Selatan, hasil analisis PDRB, rasio, pangsa sektor, indeks lokalisasi, kuota lokasi, laju pertumbuhan dan daya saing menunjukkan pesisir Utara secara keseluruhan jauh lebih tinggi dibandingkan pesisir Selatan.

Analisis *shif share* memperlihatkan perkembangan wilayah pesisir Utara mengikuti pola perkembangan wilayah terbuka bersifat dinamis, sedangkan perkembangan wilayah pesisir Selatan mengikuti pola perkembangan wilayah tertutup dan cenderung bersifat statis. Analisis komponen utama menyatakan herarki wilayah pesisir Utara dan Selatan indikator sosial demografi meliputi aspek kependudukan, kependidikan dan kesehatan berkecenderungan menurun. Analisis *skalogram* herarki wilayah indikator *man-made capital* dari aspek jumlah jenis fasilitas pelayanan memperlihatkan herarki wilayah pesisir Utara mengalami peningkatan yang relative lebih kecil dibanding pesisir Selatan. Sedangkan aspek jumlah unit fasilitas pelayanan menunjukkan herarki wilayah pesisir Utara dan Selatan menempati herarki yang relative sama peningkatannya (Hendarto, 2010)

Analisis pembentukan output, nilai tambah bruto dan pendapatan memperlihatkan terjadinya disparitas, secara keseluruhan wilayah pesisir Utara jauh lebih tinggi dibanding wilayah pesisir Selatan. Begitu juga dengan analisis pengganda output, pendapatan dan tenaga kerja, wilayah pesisir Utara jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah pesisir Selatan.

Perencanaan dan penyusunan strategi pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan berupa tipologi program dan bentuk kegiatan pembangunan, wilayah pesisir Utara lebih bersifat holistik dan lebih detail dibanding wilayah pesisir Selatan sesuai keanekaragaman dan kondisi sumberdaya yang dimiliki serta tingkat kematangan desentralisasi dan otonomi daerah yang terjadi.

Secara menyeluruh disparitas pemanfaatan sumberdaya perikanan dalam perspektif pengelolaan wilayah pesisir menyebabkan terjadinya disparitas pembangunan wilayah pesisir Utara dan Selatan di Provinsi Jawa Timur.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: apakah telah terjadi disparitas potensi ekonomi wilayah di provinsi Jawa Timur berdasarkan indeks ketahanan lingkungan, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan social ? sehingga terjadi disparitas potensi ekonomi wilayah di provinsi Jawa Timur berdasarkan indeks desa membangun di Provinsi Jawa Timur ?

1.3. Lingkup Kegiatan Penelitian

Ruang lingkup penelitian hanya sebatas ingin menganalisis terjadi disparitas potensi ekonomi wilayah di provinsi Jawa Timur berdasarkan indeks ketahanan lingkungan, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan social, sehingga terjadi disparitas potensi ekonomi wilayah di provinsi Jawa Timur berdasarkan indeks desa membangun di Provinsi Jawa Timur.

1.4. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat dirumuskan bahwa diduga telah terjadi disparitas potensi ekonomi wilayah di provinsi Jawa Timur berdasarkan indeks ketahanan lingkungan, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan social, sehingga terjadi disparitas potensi ekonomi wilayah di provinsi Jawa Timur berdasarkan indeks desa membangun di Provinsi Jawa Timur.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ketimpangan Ekonomi Antar Wilayah

Pembangunan ekonomi merupakan cara bagi suatu negara untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan ekonomi dilakukan secara berkesinambungan dan terencana untuk dapat menciptakan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya.

Program pembangunan ekonomi sebaiknya dilakukan di seluruh penjuru negara agar lebih merata. Pembangunan ekonomi bukan hanya dikerjakan di wilayah pusat pemerintahan saja, tetapi juga di daerah-daerah lain agar manfaatnya dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Program yang sebaiknya dijalankan oleh suatu negara adalah dengan cara memacu sektor industri terutama yang berbasis padat karya, sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang banyak dan akan mengurangi pengangguran. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) juga dapat dijadikan program untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Negara yang telah sukses mengembangkan program ini adalah India dengan koperasi susunya

Pemerintah juga harus memperhatikan infrastruktur yang ada di wilayahnya. Infrastruktur yang memadai dapat menarik pemodal untuk menginvestasikan dananya di wilayah tersebut. Infrastruktur juga salah satu modal yang dimiliki suatu daerah dalam meningkatkan produktivitasnya. Faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi pembangunan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Ketimpangan ekonomi antar wilayah merupakan ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Ketimpangan ekonomi antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan muncul karena adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Sehingga kemampuan suatu daerah dalam proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu, pada setiap daerah terdapat wilayah maju dan wilayah terbelakang. Ketimpangan juga memberikan implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah yang akan mempengaruhi formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan pemerintah (Sjafrizal, 2008).

Beberapa faktor utama penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi menurut Sjafrizal (2008) adalah :

a. Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam

Adanya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumberdaya alam pada masing-masing daerah mendorong timbulnya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Perbedaan kandungan sumberdaya alam mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah yang bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumberdaya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumberdaya alam lebih rendah. Sehingga pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat.

b. Perbedaan Kondisi Demografis

Kondisi demografis yang dimaksud adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.

c. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi. Apabila mobilitas tersebut kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Migrasi yang kurang lancar dapat menyebabkan kelebihan tenaga kerja pada suatu daerah. Akibatnya daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya.

d. Perbedaan Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah

Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah yang memiliki konsentrasi kegiatan ekonomi cukup besar. Kondisi ini akan

mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat.

e. Alokasi Dana Pembangunan Antar Wilayah

Investasi merupakan salah satu yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. daerah yang mendapat alokasi investasi yang lebih besar dari pemerintah atau dapat menarik lebih banyak investasi swasta akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat.

2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Hal itu juga sekaligus menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi) yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut.

Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut, juga ditentukan oleh seberapa besar terjadi *transfer payment* yaitu bagian pendapatan yang mengalir keluar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah (Tarigan, 2004).

Menurut Mankiw (2004), untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, para ekonom menggunakan data produk domestik bruto (PDB), yang mengukur pendapatan total setiap orang dalam perekonomian. Model pertumbuhan Solow menunjukkan bagaimana tabungan, pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat output perekonomian serta pertumbuhannya sepanjang waktu.

Model pertumbuhan Solow menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, tingkat tabungan perekonomian menunjukkan ukuran persediaan modal dan tingkat produksinya. Semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi pula persediaan modal dan semakin tinggi output.

Terdapat dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal, yaitu investasi (i) dan depresiasi. Investasi mengacu pada pengeluaran untuk perluasan usaha dan peralatan baru, hal ini menyebabkan persediaan modal bertambah. Depresiasi mengacu pada penggunaan modal, sehingga menyebabkan persediaan modal berkurang. Setiap nilai k , jumlah output ditentukan oleh fungsi produksi $f(k)$, dan alokasi output itu di antara konsumsi (c) dan tabungan ditentukan oleh tingkat tabungan s .

2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Kemampuan suatu daerah dalam memajukan wilayahnya pasti dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi perlu diteliti agar dapat menentukan kebijakan yang tepat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah relatif tertinggal. Apabila pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal dapat dipacu, maka diharapkan hal ini dapat mengurangi bahkan menghilangkan kesenjangan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

2.3.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu modal yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Menurut penelitian Prahara (2010), sumber daya yang dicerminkan pada kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia berhubungan dengan proses produksi. Tenaga kerja dianggap sebagai faktor positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja merupakan modal utama bagi suatu daerah untuk berproduksi.

2.3.2 Infrastruktur

Infrastruktur merupakan penunjang utama terselenggaranya proses usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya. Infrastruktur menjadi elemen penting bagi pertumbuhan ekonomi dan

perkembangan suatu daerah karena infrastruktur memfasilitasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan ekonomi.

2.3.3 Anggaran Pembangunan

Anggaran pembangunan merupakan dana yang dialokasikan untuk pembangunan bagi suatu daerah. Pada penelitian yang dilakukan Prahara (2010), anggaran pembangunan menjadi salah satu variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Anggaran tersebut menjadi salah satu alat yang berperan penting dalam peningkatan pembangunan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Masyarakat yang sejahtera merupakan salah satu indikator bahwa daerah tersebut telah berkembang dan mengalami kemajuan perekonomian.

III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Manfaat penelitian

- a) Mengetahui terjadinya disparitas potensi ekonomi wilayah di provinsi Jawa Timur berdasarkan indeks ketahanan lingkungan, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan social.
- b) Mengetahui terjadi disparitas potensi ekonomi wilayah di provinsi Jawa Timur berdasarkan indeks desa membangun di Provinsi Jawa Timur.

3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi trend dan tingkat ketimpangan ekonomi antar kabupaten/kota yang terjadi di Provinsi Jawa Timur.
2. Mengidentifikasi daerah relatif tertinggal di Provinsi Jawa Timur.
3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah miskin agar dapat mengejar ketertinggalan.
4. Merumuskan implikasi kebijakan yang tepat dalam memacu pertumbuhan ekonomi di daerah relatif tertinggal.

Indeks Desa Membangun (IDM) disusun dengan memperhatikan ketersediaan data yang bersumber dari Potensi Desa, yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Untuk perhitungan IDM 2015 digunakan sumber data PODES tahun 2014.

IDM merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan budaya. Ketiga dimensi terdiri dari variabel, dan setiap variable diturunkan menjadi indikator operasional. Prosedur untuk menghasilkan Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap indikator memiliki skor antara 0 s.d. 5; semakin tinggi skor mencerminkan tingkat keberartian. Misalnya : skor untuk indikator akses terhadap pendidikan sekolah dasar; bila Desa A memiliki akses fisik ≤ 3 Km, maka Desa A memiliki skor 5, dan Desa B memiliki akses fisik > 10 Km, maka memiliki skor 1. Ini berarti penduduk Desa A memiliki akses yang lebih baik dibandingkan dengan penduduk Desa B.
- 2) Setiap skor indikator dikelompokkan ke dalam variabel, sehingga menghasilkan skor variabel. Misalnya variabel kesehatan terdiri dari indikator (1) waktu tempuh ke pelayanan kesehatan < 30 menit, (2) ketersediaan tenaga kesehatan dokter, bidan dan nakes lain, (3) akses ke poskesdes, polindes dan posyandu, (4) tingkat aktifitas posyandu dan (5) kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).
- 3) Untuk menetapkan status setiap Desa dilakukan klasifikasi dengan menghitung range yang diperoleh dari nilai maksimum dan minimum. Nilai range yang diperoleh menjadi pembatas status setiap Desa

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah mengembangkan program unggulan berdasar tiga (3) pendekatan yang disebut sebagai pilar Desa Membangun Indonesia, yakni: (i) Jaring Komunitas Wiradesa; (ii) Lumbung Ekonomi Desa; dan (iii) Lingkar Budaya Desa. Melalui tiga (3) pilar tersebut diharapkan arah pengembangan program prioritas untuk menguatkan langkah bagi kemajuan dan kemandirian Desa, yang juga mampu dikembangkan sebagai daya lenting dalam peningkatan kesejahteraan kehidupan Desa. Tiga (3) pilar yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jaring Komunitas Wiradesa. Memperkuat kualitas manusia dengan memperbanyak kesempatan dan pilihan dalam upaya penduduk Desa menegakkan hak dan martabatnya, serta peningkatan memajukan kesejahteraan, mereka, baik sebagai individu, keluarga maupun kolektiva warga Desa. Masalah yang dihadapi saat ini adalah perampasan daya, yang ternyata pada situasi ketidakberdayaan dan marjinalisasi.

Fakta *ketidakberdayaan* itu telah berkembang menjadi *aspek, sebab*, dan sekaligus *dampak* kemiskinan, yang menghalangi manusia warga Desa itu hidup bermartabat dan sejahtera.

Kemiskinan dalam kehidupan Desa telah berkembang dalam sifatnya yang multidimensi dan cenderung melanggar hak asasi. Di sini, pilar *Jaring Komunitas Desa* harus melakukan tindakan yang mampu mendorong ekspansi kapabilitas dengan memperkuat daya pada berbagai aspek kehidupan manusia warga Desa yang menjangkau aspek nilai dan moral, serta pengetahuan lokal Desa.

2. Lumbung Ekonomi Desa. Potensi sumber daya di Desa bisa dikonversi menjadi ekonomi yang di dalamnya melibatkan adanya modal, organisasi ekonomi, ada nilai tambah dan mensejahterakan secara ekonomi. *Lumbung Ekonomi Desa* bukan hanya soal dan untuk produksi, tapi

dikapitasi memiliki nilai tambah melalui pendayagunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan. Pengembangan *Lumbung Ekonomi Desa* harus mampu menjawab masalah modal, jaringan dan memiliki informasi yang kuat dan oleh karenanya, organisasi ekonomi yang dikembangkan haruslah kompatibel dengan hal tersebut.

Dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang Desa misalnya, BUMDes akan kuat jika dibangun dan dikelola orang-orang Desa yang teruji secara nilai dan moral, serta memiliki modal sosial yang kuat, mampu mengembangkan kreasi dan daya untuk menjangkau modal, jaringan dan informasi.

3. *Lingkar Budaya Desa*. Gerakan sosial pembangunan Desa tidaklah tergantung pada inisiasi orang perorang, tidak tergantung pada insentif, tapi lebih panggilan kultural. Berdasar *Lingkar Budaya Desa*, gerakan pembangunan Desa haruslah dilakukan karena kolektivisme, didalamnya terdapat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran mau melakukan perubahan secara kolektif.

Pembangunan Desa hendaknya melampaui panggilan pribadi. Dana Desa dalam konteks memperkuat pembangunan dan pemberdayaan Desa, misalnya, harus dikritisi agar tidak menjadi bentuk ketergantungan baru. Tidak ada Dana Desa tidaklah boleh sekali-kali dimaknakan sebagai tidak ada pembangunan.

Adanya Dana Desa haruslah menghasilkan kemajuan, bukan kemunduran. Maka, pembangunan Desa dimaknai sebagai kerja budaya dengan norma dan moral sebagai pondasinya, sebagai *code of conduct*, dan dengan begitu perilaku ekonomi dalam kehidupan Desa akan mampu menegakkan martabat dan mensejahterahkan. Di sini, *Lingkar Budaya Desa* bertugas memastikan itu terjadi.

Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas di Jawa Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Status Pendidikan, 2016 disajikan pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas di JaTim Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, dari status Kependidikan, 2016

		Belum Pernah sek	SD/MI/Paket A	SMP/MTs/Paket B	SMA/SMK/Paket C	D1/D2/D3	D4/S1/S2/S3	Tidak Bersekolah
1	Pantura	9.08	11.46	4.67	3.82	0.14	1.85	67.71
2	Daratan	7.78	10.35	4.85	4.38	0.14	1.49	70.01
3	Pansela	8.81	10.82	4.49	3.54	0.17	1.33	70.84

Tabel 1, menunjukkan di wilayah pantura data yang belum pernah sekola lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah penelitian yang lain (daratan dan Pansela) yaitu 9,08 %. Akan tetapi kelompok yang tidak melanjutkan bersekola lebih sedikit yaitu hanya 67,71 %. Wilayah daratan data yang belum pernah sekola paling rendah dibandingkan dengan wilayah penelitian yang lain (daratan dan Pansela) yaitu 7,78 %. Akan tetapi kelompok yang tidak melanjutkan bersekola berada di tengah tengah yaitu 70,01%. Wilayah pansela data yang belum pernah sekola berada di tengah tengah dibandingkan dengan wilayah penelitian yang lain (daratan dan Pansela) yaitu 8,81 %. Akan tetapi kelompok yang tidak melanjutkan bersekola berada paling tinggi yaitu 70,84%.

Di wilayah pansela dari sisi pendidikan terlihat tenaga kerja yang tidak terdidik paling tinggi, sedangkan untuk tenaga kerja berpendidikan sma dan atau D4, S1, S2 dan S3 paling rendah. Jauh berbeda dengan kondisi wilayah pantura yaitu tenaga kerja yag tidak terdidik paling kecil dan tenaga yang terdidik setingkat sma dan atau D4, S1, S2 dan S3 paling Tinggi. Sehingga masih terlihat disparitas dari sisi kependidikan.

Tabel 2. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas di JaTim Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2016

		Tidak Bisa baca	Dapat Baca Tulis Huruf	Jumlah
1	Pantura	9.23	90.77	100.00
2	Daratan	8.33	91.66	100.00
3	Pansela	7.66	92.34	100.00

Pada tabel 2 terlihat bahwa di wilayah pantura, persentase penduduk yang tidak bisa membaca lebih besar dari wilayah lainnya. Diikuti dengan wilayah

daratan untuk jumlah penduduk yang tidak bisa membaca dan yang paling kecil adalah wilayah Pansela. Hal sebaliknya terjadi untuk kemampuan menulis huruf, di wilayah Pansela menunjukkan persentase yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah daratan dan Pantura. Selanjutnya di ikuti wilayah daratan dan wilayah Pantura.

Tabel 3. Persentase Penduduk di Jawa Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan, 2016

		<200	200. s/d 299.	300. s/d 499.	500 s/d 749	750 s/d 999	1 000 s/d 1 499	1 500 +	Jumlah
1	Pantura	0.71	7.43	26.0 7	22.1 9	17.4 0	15.1 8	11.02	100.00
2	Daratan	0.94	10.53	32.7 9	22.0 4	13.1 9	12.4 4	8.08	100.00
3	Pansela	1.06	10.83	33.8 0	22.9 3	13.11	11.96	7.10	100.00

Pada tabel 3 memperlihatkan bahwa di wilayah pantura, persentase penduduk dengan pengeluaran tertinggi berada di kisaran pengeluaran perkapita sebesar Rp. 750.000 sampai dengan Rp. 1.000.000 ke atas. Sedangkan untuk pengelompokan pengeluaran perkapita di bawah Rp. 750.000 sampai dengan Rp. 1.000.000 ke bawah adalah terkecil. Hal berbeda di tunjukkan pada wilayah Pansela, persentase penduduk dengan pengeluaran terendah berada di kisaran pengeluaran perkapita sebesar Rp. 750.000 sampai dengan Rp. 1.000.000 ke atas. Sedangkan untuk pengelompokan pengeluaran perkapita di bawah Rp. 750.000 sampai dengan Rp. 1.000.000 ke bawah adalah terbesar. Untuk wilayah daratan dengan parameter golongan pengeluaran perkapita berada pada posisi menengah untuk hamper disemua golongan pengeluaran perkapita.

Selanjutnya disampaikan Rasio wilayah ditingkat desa yang mempunyai status Desa Maju, Desa Mandiri, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal di ke tiga wilayah studi disampaikan pada tabel 4 berikut :

Tabel 4. Sebaran Status Desa di Ketiga Wilayah Studi di Jawa Timur.

	Uraian	IDM	Maju		Mandiri		Berkembang		Tertinggal		Sangat tertinggal	
			Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Pantura	0.6226	760	9,84	212	2,75	1007	13,04	512	6,63	9	0,12
2	Daratan	0.6459	788	10,21	220	2,85	1045	13,54	531	6,88	9	0,12
3	Pansela	0.6543	798	10,34	223	2,89	1058	13,70	538	6,97	9	0,12
			2346	30,39	655	8,48	3110	40,28	1582	20,49	27	0,35

Secara makro pada tabel 4 menunjukkan bahwa untuk desa maju, berada pada wilayah Pansela yang menunjukkan nilai 10,34 persen, untuk desa mandiri sebesar 2,89 persen, untuk desa berkembang sebesar 13,70 persen. Desa tertinggal sebesar 6,97 persen dan desa sangat tertinggal 0,12 persen. Hal ini menandakan di wilayah Pansela secara umum memiliki jumlah yang tertinggi. Untuk wilayah Pantura terlihat sangat berlawanan dengan wilayah pansela. Untuk status desa maju, wilayah Pantura mempunyai nilai 9,84 persen, untuk desa mandiri sebesar 2,75 persen, untuk desa berkembang sebesar 13,04 persen. Desa tertinggal sebesar 6,63 persen dan desa sangat tertinggal 0,12 persen. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah pantura memiliki status desa yang paling sedikit. Sedangkan untuk wilayah daratan memiliki nilai secara umum berada diantara wilayah pantura dan wilayah pansela.

Tabel 5. Indeks Desa Membangun Jawa Timur 2015

	Uraian	IKL	IKE	IKS	IDM
1	Pantura	0.6399	0.5362	0.6919	0.6226
2	Daratan	0.6620	0.5722	0.7034	0.6459
3	Pansela	0.6823	0.5703	0.7102	0.6543

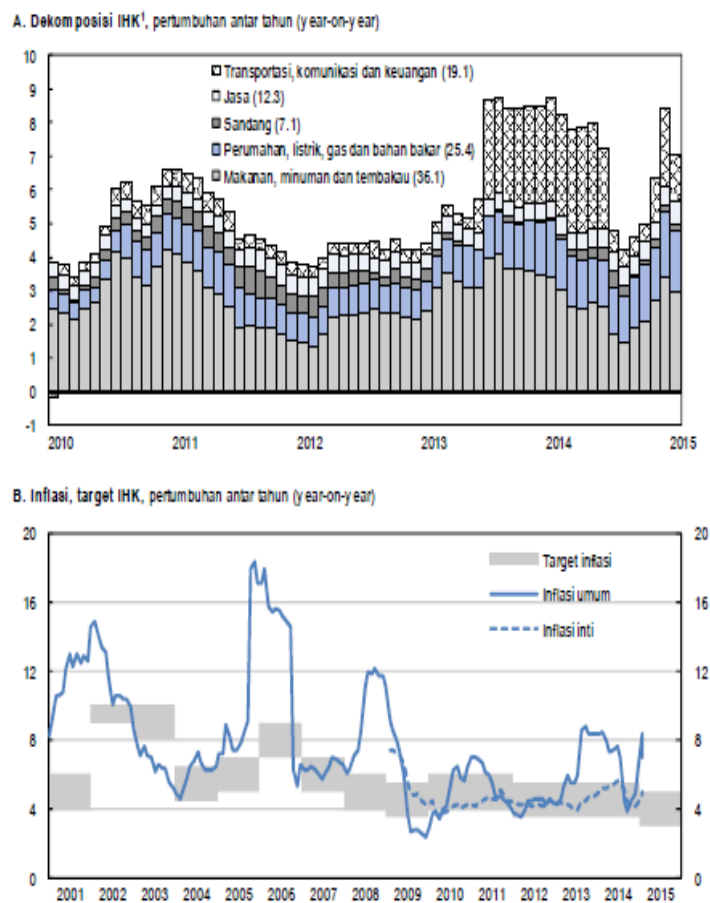
Keterangan :

- IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan (EKOLOGI)
- IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi
- IKS = Indeks Ketahanan Sosial
- IDM = Indeks Desa Membangun

Pada tabel 5, ditunjukkan bahwa untuk parameter indeks katahanan lingkungan nilai terbesar berada pada wilayah Pansela yaitu sebesar 0, 6823 diikuti wilayah daratan sebesar 0,6620 dan terendah adalah wilayah pantura sebesar 0,6399. Untuk parameter indeks katahanan ekonomi nilai terbesar berada pada wilayah daratan yaitu sebesar 0, 5722 diikuti wilayah Pansela sebesar 0,5703 dan terendah adalah wilayah pantura sebesar 0,5362. Untuk parameter indeks

katahanan social nilai terbesar berada pada wilayah Pansela yaitu sebesar 0,7102 diikuti wilayah daratan sebesar 0,7034 dan terendah adalah wilayah pantura sebesar 0,6919.

Pada tabel 5 juga terlihat bahwa berdasarkan indeks Desa Membangun maka wilayah Pansela memiliki nilai yang terbesar yaitu 0,6543 di ikuti wilayah daratan sebesar 0,6459 dan nilai terendah di perlihatkan di wilayah pantura yaitu sebesar 0,6226.



Gambar 1. Gambaran Faktor Inflasi dan Dekomposisi tahun 2001 -2015

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2011. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur: Kabupaten/Kota Se Jawa Timur 2006-2010*. Surabaya: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Provinsi Jawa Timur dalam Angka Tahun 2011*. Surabaya: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2009-2010*. Jakarta: BPS.
- Firdaus, Muhammad. 2011. *Ekonometrika: Suatu Pendekatan Aplikatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hendarto. Totok, 2010. Analisis Disparitas Pemanfaatan Perikanan dalam Perspektif Pengelolaan Provinsi Jawa Timur. Disertasi Doktor. Sekolah Pasca Sarjana IPB. Bogor.
- Mankiw, N. Gregory. 2004. *Teori Makroekonomi*. Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga.
- Prahara, Guntur. 2010. *Analisis Disparitas Antar Wilayah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Barat* [Tesis]. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media.

Lampiran 1. Indeks Desa Membangun Provinsi Jawa Timur

	Kode Kab	Nama kab/kota	IKL	IKE	IKS	IDM
1	35001	PACITAN	0,7112	0,6100	0,6743	0,6652
2	35002	PONOROGO	0,6463	0,5568	0,6661	0,6231

3	35003	TRENGGALEK	0,6526	0,5828	0,6776	0,6377
4	35004	TULUNGAGUNG	0,6802	0,5383	0,7120	0,6435
5	35005	BLITAR	0,6979	0,5445	0,6998	0,6474
6	35006	KEDIRI	0,6626	0,5473	0,6886	0,6328
7	35007	MALANG	0,6658	0,6033	0,7245	0,6645
8	35008	LUMAJANG	0,6737	0,5205	0,7168	0,6370
9	35009	JEMBER	0,6979	0,5759	0,7223	0,6654
10	35010	BANYUWANGI	0,6991	0,6105	0,7759	0,6952
11	35011	BONDOWOSO	0,6644	0,5459	0,6739	0,6281
12	35012	SITUBONDO	0,6273	0,5348	0,6958	0,6193
13	35013	PROBOLINGGO	0,6466	0,5631	0,6813	0,6303
14	35014	PASURUAN	0,6448	0,5562	0,6865	0,6292
15	35015	SIDOARJO	0,6110	0,5651	0,7479	0,6413
16	35016	MOJOKERTO	0,6493	0,5373	0,7101	0,6322
17	35017	JOMBANG	0,6691	0,5588	0,7049	0,6443
18	35018	NGANJUK	0,6520	0,5452	0,6849	0,6274
19	35019	MADIUN	0,6929	0,5907	0,7270	0,6702
20	35020	MAGETAN	0,6554	0,6017	0,7033	0,6535
21	35021	NGAWI	0,6638	0,5161	0,6829	0,6210
22	35022	BOJONEGORO	0,6784	0,5577	0,6852	0,6405
23	35023	TUBAN	0,6727	0,5046	0,6550	0,6108
24	35024	LAMONGAN	0,6495	0,5044	0,6667	0,6068
25	35025	GRESIK	0,6275	0,5251	0,7099	0,6208
26	35026	BANGKALAN	0,6623	0,5392	0,5946	0,5987
27	35027	SAMPANG	0,6448	0,5681	0,6698	0,6276
28	35028	PAMEKASAN	0,6472	0,5295	0,6642	0,6136
29	35029	SUMENEP	0,6610	0,5309	0,6244	0,6054
30	35079	BATU	0,6491	0,7122	0,7964	0,7192

Lampiran 2. Nilai Indeks Williamson Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2015

			2012	2013	2014	2015	Rata-rata
--	--	--	------	------	------	------	-----------

1	TUBAN	Pantura	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	LAMONGAN	Pantura	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
3	GRESIK	Pantura	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
4	SITUBONDO	Pantura	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
5	PROBOLINGGO	Pantura	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1
6	PASURUAN	Pantura	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
7	SIDOARJO	Pantura	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

1	MOJOKERTO	Daratan	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
2	JOMBANG	Daratan	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1
3	NGANJUK	Daratan	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
4	MADIUN	Daratan	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
5	MAGETAN	Daratan	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
6	NGAWI	Daratan	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
7	BOJONEGORO	Daratan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	PONOROGO	Daratan	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
9	BONDOWOSO	Daratan	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
10	BATU	Daratan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	PACITAN	Pansela	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
2	TRENGGALEK	Pansela	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
3	TULUNGAGUN G	Pansela	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
4	BLITAR	Pansela	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
5	KEDIRI	Pansela	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
6	MALANG	Pansela	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
7	LUMAJANG	Pansela	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
8	JEMBER	Pansela	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
9	BANYUWANGI	Pansela	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

Lampiran 3. Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur jika dilihat dari data antar Kabupate/Kota

			Penduduk miskin (000)	Persentase Penduduk miskin	Garis Kemiskinan Rp/Kap/Bln
1	TUBAN	Pantura	191,10	16,64	272.900
2	LAMONGAN	Pantura	186,10	15,68	266.953
3	GRESIK	Pantura	166,90	13,41	270.890
4	SITUBONDO	Pantura	87,70	13,15	246.483
5	PROBOLINGGO	Pantura	231,90	20,44	340.539
6	PASURUAN	Pantura	170,70	10,86	283.327
7	SIDOARJO	Pantura	133,80	6,40	346.536

1	MOJOKERTO	Daratan	113,30	10,56	293.609
2	JOMBANG	Daratan	133,50	10,80	301.162
3	NGANJUK	Daratan	136,50	13,14	308.506
4	MADIUN	Daratan	81,20	12,04	265.310
5	MAGETAN	Daratan	74,00	11,80	289.403
6	NGAWI	Daratan	123,20	14,88	348.888
7	BOJONEGORO	Daratan	190,90	15,48	305.174
8	PONOROGO	Daratan	99,90	11,53	247.368
9	BONDOWOSO	Daratan	111,90	14,76	299.819
10	BATU	Daratan	9,10	4,59	355,317
1	PACITAN	Pansela	88,90	16,18	220.810
2	TRENGGALEK	Pansela	90,00	13,10	250.666
3	TULUNGAGUN G	Pansela	89,00	8,75	277.707
4	BLITAR	Pansela	116,70	10,22	244.382
5	KEDIRI	Pansela	196,80	12,77	251.547
6	MALANG	Pansela	280,30	11,07	254.380
7	LUMAJANG	Pansela	120,70	11,75	234,728
8	JEMBER	Pansela	270,40	11,28	267.962
9	BANYUWANGI	Pansela	147,70	9,29	285.004